



STIE Mahaputra Riau

AMBITEK

Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi

Vol. 2. No. 1 (2022) Hal. 25-40

Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Jawa Barat

**Fifi Amylia Yahya^{1*}, Ahmad Ulinnuha², Nafisatul Khif Dhiah³,
Anjani Mutiara Azkia⁴, Saiful Anwar⁵**

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia

*Email: saifulanwarmieta@iainsalatiga.ac.id

Abstract

This research aims to analyze region's native income (pad), results-sharing funds (DBH), and population (jp) of regional spending (db) districts (west Java). The population of this research is eight counties. The sample used in this study is the use of the random sampling method. The data analysis technique by using the regression analysis of the panel. Based on analysis already done, it may be concluded that partial original-income (pad) and outsource funds (DBH) have a negative and insignificant impact on area spending, while the number of people (jp) has a positive and significant impact on local spending. Simultaneously, DBH, jp has a significant impact on regional spending. The study provides implications specifically to the county/provincial governments of west Java to increase quality and resources such as natural resources and human resources that are expected to boost local reception and cut down on the central government's transfer fund.

Keywords: Regional expenditur, regional original income, profit sharing funds, population.

Pendahuluan

Fenomena yang terjadi pada pemerintah Kab/kota di Jawa Barat menggambarkan bahwa tidak semua pemerintah daerah tidak mapan secara keuangan. Hal ini dapat dilihat dari data pertumbuhan belanja daerah yang merupakan salah satu indikator dari kinerja keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan adanya perbedaan pertumbuhan belanja daerah yang tidak merata. Fenomena selanjutnya yaitu adanya peningkatan pendapatan asli daerah tetapi tidak diikuti oleh peningkatan belanja daerah. Berdasarkan fenomena yang ada masalah berupa kemampuan keuangan pemerintah daerah yang tidak maerata dalam mengalokasikan belanja daerahnya. Perbedaan yang signifikan dari pertumbuhan belanja daerah Kab/kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan telah terjadi kesenjangan masalah keuangan antar daerah satu dengan daerah yang lain dan pada akhirnya akan menimbulkan kesenjangan kesejahteraan antar daerah (Dermawan, 2016). Belanja daerah pada suatu daerah Kabupaten/Kota dipergunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang sudah menjadi sebuah kewenangan dari provinsi atau daerah/kota itu sendiri. Belanja daerah memiliki struktur anggaran daerah yang meliputi belanja



aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak tersangka. Beberapa faktor yang mempengaruhi belanja adalah Pendapatan Asli daerah (PAD) yaitu sumber pendapatan yang penting bagi suatu daerah dalam memenuhi pembelanjannya karena semakin meningkat pendapatan maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal juga akan mengalami suatu peningkatan jadi kemampuan dan efektivitas keuangan daerah dalam merealisasikan PAD akan memperlihatkan tingkat kemandirian daerah dalam mengelola potensi dan manajemen keuangan daerah (Zais, 2017), Dana Bagi Hasil yaitu karena DBH merupakan modal dasar pemerintah daerah dalam menetapkan dana pembangunan dan dalam rangka memenuhi belanja modal maka dari itu semakin besar DBH maka semakin besar pula belanja modal, dan Jumlah penduduk yaitu merupakan subyek pembangunan yang mana dengan meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi logis adanya peningkatan sarana dan prasarana umum dari aspek kuantitas maupun kualitas maka perkembangan penduduk yang semakin besar akan memerlukan anggaran yang besar juga supaya kualitas pertumbuhan ekonomi lebih baik dan harus selalu dikendalikan.

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan kedalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dianggarkan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan atau dana yang diperoleh atau dihasilkan oleh suatu daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah dipungut sesuai dengan peraturan daerah itu sendiri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Menurut (Rudiansyah, 2015). PAD juga dapat diartikan sebagai pendapatan daerah yang bergantung pada keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber PAD itu sendiri (Sasana, 2011). Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan dana yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Pendapatan asli daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi suatu daerah, pendapatan pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain yang bersumber dari daerah itu sendiri. Pendapatan daerah merupakan aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi berdasarkan fungsinya, namun kenyataan yang terjadi adalah dana transfer dijadikan sebagai sumber penerimaan utama daerah daripada PAD. Pendapatan asli daerah dimanfaatkan untuk kepentingan daerah tersebut yang sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Pada pasal 3 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah itu sendiri sebagai perwujudan desentralisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Chalil & Munawar, 2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja daerah (BD). Penelitian yang



dilakukan oleh (Untung et al., 2017) juga menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah. PAD merupakan sumber penerimaan yang diperoleh oleh daerah itu sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung beban belanja daerah. Semakin besar belanja daerah yang dibutuhkan maka pemerintah daerah akan terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut, dan semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan PAD akan maka semakin longgar pengalokasian belanja daerah sehingga nantinya akan terjadi hubungan positif yaitu antara PAD dengan belanja daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan pendistribusian dana bagi pemerintah kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang telah diatur berdasarkan permendagri. Untuk mengurangi ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka dilakukan sistem bagi hasil penerimaan dari pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah (Ernayani, 2017). Dana bagi hasil digunakan untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah sehingga daerah dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan layak kepada masyarakat setempat yang bersumber dari dana APBN. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Untung et al., (2017) bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap belanja daerah provinsi Jawa Barat.

Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 Bulan atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Peningkatan jumlah belanja di suatu daerah juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk di daerah tersebut. Jumlah penduduk yang besar bagi daerah oleh rencana pembangunan dipandang sebagai aset modal dasar pembangunan dan sebagai bahan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar juga akan menjadi beban apabila struktur belanja daerah rendah serta persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah, sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Devita et al., 2014).

Belanja Daerah (BD)

Menurut Sasana (2011) belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Belanja merupakan variable terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat (Sasana, 2011) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa indikator belanja daerah terdiri dari belanja langsung yang ditambahkan dengan belanja tidak langsung. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban suatu daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh anggarannya kembali oleh daerah tersebut (PP No. 58 Tahun 2005) tentang pengelolaan keuangan. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU Nomor 33 Tahun 2004).



Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan yang lain-lain pendapatan asli daerah (Dermawan, 2016). Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk pemerataan keuangan suatu daerah atau antar daerah agar dapat mendanai semua kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Susanti & Fahlevi, 2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Untung et al., 2017); (Santosa & Rofiq, 2013); (Adyatma & Oktaviani, 2015); (Suryani, 2018) dengan obyek kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat bahwa pendapatan asli daerah dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat diperoleh hipotesis yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD).

Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan pemerintah pusat (APBN) kemudian dialokasikan menjadi APBD. Alokasi tersebut berdasarkan persentase tertentu, DBH digunakan untuk mendanai kebutuhan suatu daerah. Tujuan lain dari DBH yaitu untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dengan tetap memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU Tahun 2004).

Dengan semakin besarnya penerimaan DBH maka semakin besar pula BD, tentunya DBH sangat memiliki keterkaitan dengan BD. Berdasarkan *riset* yang dilakukan oleh (Untung et al., 2017); (Nugroho & Hardi, 2014); (Putra & Dwirandra, 2015) Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (BD). Kemudian diperoleh hipotesis yaitu, DBH berpengaruh positif terhadap BD.

Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih atau mereka berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap di Indonesia (Gorahe et al., 2014). Data jumlah penduduk bisa di Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melalui sensus penduduk sebelumnya. Jumlah penduduk yang memiliki hubungan erat dengan belanja daerah bahkan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dibuktikan dari hasil penelitian (Sanusi & Yusuf, 2018); (Devita et al., 2014); (Samudra & Handayani, 2020) menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Maka diperoleh hipotesis yaitu JP berpengaruh positif terhadap BD.



Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data panel. Data panel bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfokus pada Realisasi Anggaran, dan data jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat dalam rentang waktu 2015-2019. Keseluruhan data jumlah penduduk diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu data jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat. Dan data yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berisi mengenai realisasi anggaran suatu daerah.

Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk yang di Kab/kota di Jawa Barat. Dalam penelitian ini populasinya yaitu 8 Kab/kota di Provinsi Jawa Barat yang diperoleh melalui BPS (Badan Pusat Statistik). Sampel adalah populasi yang ditunjuk secara terencana.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik full sampling, semua populasi digunakan menjadi sampel. Pemilihan teknik sampling karena menggunakan sampel dari 8 kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat selama 5 tahun dari tahun 2015-2019. 8 kabupaten tersebut yaitu Kab. Bandung, Kab. Cianjur, Kab. Cirebon, Kab. Garut, Kab. Indramayu, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, dan Kab. Sukabumi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi dan data panel. Dari data-data tersebut kemudian dilakukan pengujian data mengenai pengaruh antara variabel independen terhadap dependen. Pengujian dalam penelitian dilakukan dengan uji menggunakan aplikasi eviews meliputi; uji statistik deskriptif, uji stasioneritas, uji linear berganda, uji statistik, dan uji asumsi klasik. Untuk melakukan pengambilan keputusan atau melihat signifikansi sebuah uji data maka dapat dilihat apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel yang telah diuji. Dan apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi pengaruh yang signifikan antar variabel yang diuji.

Hasil dan Pembahasan

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif ini dilakukan untuk memperoleh nilai rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum dari masing-masing variabel. Pada riset ini, jumlah data yang digunakan sebanyak 40 sampel kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2015-2019. Berikut hasil uji statistik deskriptif:



Tabel 1. Hasil uji statistic deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	2.90E+12	7.86E+11	1.30E+11	2135182.
Median	3.00E+12	5.00E+11	1.53E+10	2218062.
Maximum	5.15E+12	4.61E+12	2.07E+12	3775279.
Minimum	3.28E+09	2.29E+11	2.64E+08	1055417.
Std. Dev.	1.24E+12	9.89E+11	3.40E+11	788361.7
Observations	40	40	40	40

Uji statistik deskriptif merupakan bentuk analisis penelitian yang digunakan untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan satu sampel, statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan dan memberikan keterangan tentang suatu data atau keadaan dan fenomena (Coleman & Fuoss, 1955). Berdasarkan uji statistic deskriptif pada table diatas untuk variabel PAD (X1) nilai rata-rata diperoleh sebesar 2.90E+12, untuk nilai standar deviasinya diperoleh sebesar 2.29E+11. Sedangkan nilai maximum dan nilai minimum diperoleh sebesar 4.61E+12 dan 2.29E+11. Variabel DBH (X2) diperoleh nilai rata-rata sebesar 1.30E+11, standar deviasi sebesar 2.64E+08, kemudian nilai maximum dan minimum diperoleh nilai sebesar 2.07E+12 dan 2.64E+08. Variabel Jumlah Penduduk (X3) diperoleh nilai rata-rata sebesar 2135182., dengan standar deviasi 1055417, sedangkan nilai maksimum dan nilai minimum diperoleh sebesar 3775279 dan 1055417. Variabel Belanja Daerah (Y) diperoleh nilai rata-rata sebesar 2.90E+12, dengan nilai standar deviasi sebesar 3.28E+09, serta nilai maksimum dan nilai minimum 5.15E+12 dan 3.28E+09.

Uji Stasioneritas

Uji stasioneritas bertujuan untuk mengetahui apakah data stasioner dapat langsung diestimesi ataukah tidak stasioner karena mengandung unsur trend (Random Walk) yang dilakukan penanganan tertentu yaitu dengan jalan mendefferencing (Akbar, 2016). Penelitian ini menggunakan uji *unit root Levin, Lin & Chu* pada *1stdifference* dalam pengujian stasioneritas. Adapun stasioneritas data dapat dilihat dari nilai probabilitas $< \alpha=0,5$. Jika data yang digunakan ada yang tidak stasioner, maka perlu di cek kembali validitas dan kestabilannya.



Tabel 2. Uji Stasioneritas

No.	Variabel	Prob*	Keterangan
1	Belanja Daerah (Y)	0.0000	Data Stasioner
2	Pendapatan Asli Daerah	0.0000	Data Stasioner
3	Dana Bagi Hasil	0.0000	Data Stasioner
4	Jumlah Penduduk	0.0000	Data Stasioner

Dari tabel uji stasioneritas diatas diperoleh nilai probabilitas variabel Belanja Daerah (Y) sebesar 0,0000, nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha yaitu 0,05 artinya belanja daerah memperoleh hasil yang stasioner dan dapat dikatakan signifikan. Kemudian variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki nilai probabilitas 0,0000 lebih kecil dari nilai alpha 0,05, artinya memperoleh hasil yang stasioner dan dapat dikatakan signifikan. Variabel Dana Bagi (X2) Hasil memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari nilai alpha dan dapat memperoleh hasil yang stasioner serta juga dapat dikatakan signifikan. Kemudian variabel Jumlah Penduduk (X3) memiliki nilai probabilitas 0,0000 lebih kecil dari nilai alpha 0,05 memperoleh hasil yang stasioner dan dapat dikatakan signifikan.

Uji Model

Uji Chow

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.279667	(7,29)	0.0559
Cross-section Chi-square	17.537018	7	0.0142

Hasil penelitian menggunakan uji chow berdasarkan nilai *cross-section chi-square* > 0,05 maka model yang terpilih adalah model CEM. Tetapi jika nilai *cross-section chi-square* < 0,05 maka model yang terpilih adalah model FEM. Berdasarkan uji tabel diatas nilai dari *cross-section chi-square* adalah 0,0142 > 0,05 maka *commont effect* CEM yang terpilih dalam hasil pengujian.



Uji Hausman

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq.		
	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.038069	3	0.3858

Uji yang dilakukan selanjutnya yaitu uji hausman. Uji hausman digunakan untuk menentukan model yang terbaik diantara *Fixed Effect* (FEM) dengan *Random Effect* (REM). Penentuan keputusan yaitu dilihat pada nilai *cross-section random*. Apabila nilai *cross-section random* $> 0,05$ maka model regresi yang terpilih yaitu *Random effect*. Namun ketika nilai yang diperoleh $< 0,05$ maka model regresi terpilih yaitu *Fixed Effect*. Berdasarkan pada (tabel 4) diatas diperoleh nilai dari *cross-section random* = $0,3858 > 0,05$ artinya, *Random Effect* (REM) yang terpilih dalam pengujian.

Tabel 5. Uji Lagrange Multiplier

Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	1.361209 (0.2433)	0.172203 (0.6782)	1.533412 (0.2156)

Setelah itu dilakukan uji *lagrange multiplier*. Uji *lagrange multiplier* digunakan untuk memilih apakah model yang digunakan *Random Effect* atau *Common Effect* (Karim et al., 2018). Penentuan keputusan dalam uji *lagrange multiplier* dapat dilihat apabila nilai *Breusch Pagan* $> \alpha = 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Common Effect* dan sebaliknya jika nilai *Breusch Pagan* $< \alpha = 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Random Effect*. Berdasarkan tabel 5 diatas diperoleh nilai dari *Breusch Pagan* yaitu $0.2433 > 0.05$ maka model yang terpilih adalah *Common Effect* (CEM).



Tabel 6. Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.35E+11	4.80E+11	1.945622	0.0595
Pendapatan Asli Daerah	-0.057034	0.189370	-0.301179	0.7650
Dana Bagi Hasil	-0.727599	0.463513	-1.569748	0.1252
Jumlah Penduduk	983946.0	238053.6	4.133295	0.0002
R-squared	0.424501	Mean dependent var		2.90E+12
Adjusted R-squared	0.376543	S.D. dependent var		1.24E+12
S.E. of regression	9.80E+11	Akaike info criterion		58.15388
Sum squared resid	3.46E+25	Schwarz criterion		58.32277
Log likelihood	-1159.078	Hannan-Quinn criter.		58.21495
F-statistic	8.851471	Durbin-Watson stat		1.337383
Prob(F-statistic)	0.000158			

Uji R Square

Uji R square digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Inawati et al., 2021). Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R-square besarnya 0.424501 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel pendapatan asli daerah (X1), dana bagi hasil (X2), dan jumlah penduduk (X3) terhadap belanja daerah sebesar 42,45%. Artinya PAD, DBH dan JP memiliki pengaruh terhadap BD sebesar 42,45% sedangkan sisanya 57,55% dengan perhitungan $(100\% - 42,45\%)$ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini.

Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk menguji seluruh variabel bebas secara bersamaan atau simultan terhadap variabel terikat. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 3 di atas. Nilai prob. F (Statistic) sebesar 0.000158 lebih kecil dari tingkat signifikan yaitu 0,05 ($0.000158 < 0.05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

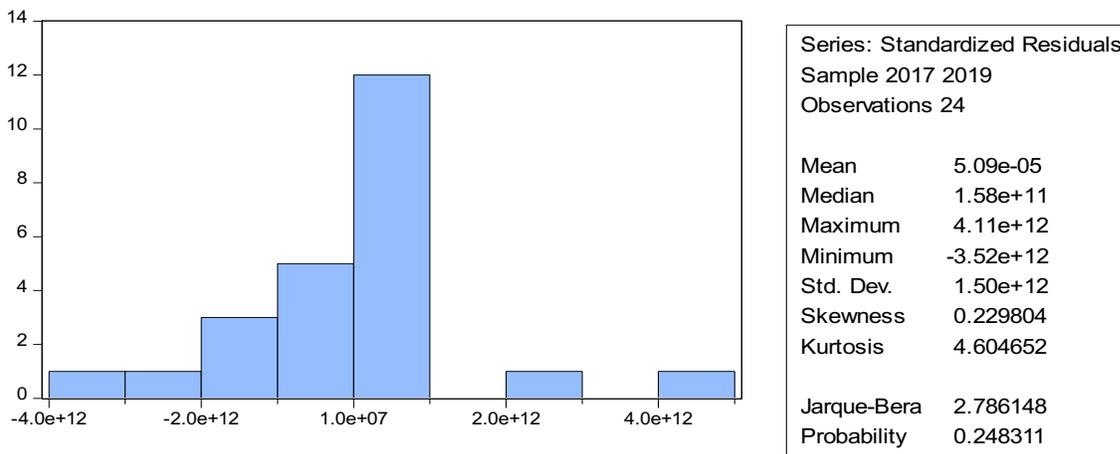
Uji Statistik T



Uji T statistic digunakan untuk melihat kemampuan dari variabel bebas dalam menjelaskan kemampuan terhadap variabel terikat. Dalam hal ini dapat dilihat dengan membandingkan nilai probabilitas dari setiap variabel independen dengan alpha yaitu 0,05. Melihat pada table diatas nilai prob. t hitung dari variabel X1 (pendapatan asli daerah) sebesar $0.7650 > 0,05$ sehingga pendapatan asli daerah memiliki hubungan negative tetapi tidak signifikan terhadap belanja daerah. Selanjutnya, untuk variabel X2 (dana bagi hasil) sebesar $0.1252 < 0,05$ sehingga dana bagi hasil memiliki hubungan negative tetapi tidak signifikan terhadap belanja daerah. Selanjutnya untuk variabel X3 (jumlah penduduk) sebesar $0.0002 < 0,05$. Artinya jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara melihat Jarque-Bera Test. Untuk melihat data terdistribusi normal atau tidak dapat dilihat dengan membandingkan nilai dari probabilitas data dengan alpha 0,05. Apabila probabilitas $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdistribusi normal. Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal. Pada hasil uji data diatas hasil probability Jarque-Bera $0,248311 > 0,05$ artinya dapat terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas



Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

	D(X1,2)	D(X2,2)	D(X3,2)
D(X1,2)	1.000000	-0.019321	-0.011423
D(X2,2)	-0.019321	1.000000	-0.069443
D(X3,2)	-0.011423	-0.069443	1.000000

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah suatu data terjadi gejala multikolinieritas atau tidak. Untuk melihat apakah terjadi gejala multikolinieritas atau tidak dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* yang akan dibandingkan dengan nilai tolerance 0,10. Apabila nilai hasil data > 0,10 maka terjadi gejala multikolinieritas, dan apabila < tidak ada gejala multikolinieritas. Dalam hasil tabel penelitian ini menunjukkan < 0,10 maka dapat dikatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.56E+12	8.34E+11	1.864702	0.1357
D(X1,2)	-1.436494	4.105576	-0.349888	0.7441
D(X2,2)	-0.620864	1.157681	-0.536300	0.6202
D(X3,2)	1206810.	2316726.	0.520912	0.6299
R-squared	0.182629	Mean dependent var		1.26E+12
Adjusted R-squared	-0.430399	S.D. dependent var		1.05E+12
S.E. of regression	1.25E+12	Akaike info criterion		58.85370
Sum squared resid	6.25E+24	Schwarz criterion		58.89342
Log likelihood	-231.4148	Hannan-Quinn criter.		58.58580
F-statistic	0.297913	Durbin-Watson stat		0.000000
Prob(F-statistic)	0.826264			



Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui terjadinya ketidaksamaan varian dari residual antar suatu pengamatan. Metode yang digunakan untuk uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji glejser. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji glejser dengan melakukan regresi variabel bebas dan nilai *absoluteresidual* (Bawono & Shina, 2018). Uji Glejser adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Hasanah, 2008). Terjadi tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat dari nilai Prob.F, apabila nilai Prob.F > 0,05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, tetapi jika nilai dari Prob.F < 0,05 maka terjadi heterokedastisitas.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas untuk variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,7441, Dana Bagi Hasil 0,6202, dan Jumlah Penduduk nilai probabilitasnya 0,6299. Dapat diamati keseluruhan nilai probabilitas yang dimiliki oleh variabel-variabel menunjukkan nilai lebih besar dari $\alpha=0,05$. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.439126	Prob. F(2,34)	0.1024
Obs*R-squared	5.019004	Prob. Chi-Square(2)	0.0813

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak, antara priode yang diujikan pada model regresi. Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Breusch-Godfrey. Apabila nilai Prob. $F(2,34) > 0,05$ maka tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya apabila nilai Prob. $F(2,34) < 0,05$ maka terjadi autokorelasi. Dapat dilihat dari tabel diatas diperoleh hasil dari nilai probabilitas Prob. $F(2,34)$ sebesar 0.1024 > 0,05 maka tidak terjadi gejala autokorelasi.



STIE Mahaputra Riau

AMBITEK

Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi

Vol. 2. No. 1 (2022) Hal. 25-40

Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah

Dari hasil penelitian bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kab/kota di Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2015-2019. Tidak signifikannya pengaruh pendapatan asli daerah dikarenakan belum optimalnya potensi kekayaan yang ada di provinsi Jawa Barat. Pendapatan daerah selain dari pajak, upaya peningkatan pendapatan asli daerah lain adalah dengan meningkatkannya kemandirian ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam provinsi Jawa Barat. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah tersebut agar tidak mengalami deficit fiskal. Sasaran serta tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan dan sektor perekonomian daerah dalam rangka desentralisasi dapat diwujudkan dengan belanja daerah dimana pemasukan serta pengeluaran belanja dapat diterima dari dana bagi hasil dan dialokasikan dengan proporsi yang tepat. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rahmawati & Suryono, 2015) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Lain halnya dengan *riset* yang dilakukan oleh (Untung et al., 2017); (Santosa & Rofiq, 2013); (Adyatma & Oktaviani, 2015); (Suryani, 2018) didalam penelitiannya menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD).

Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah

Dari hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kab/kota di Provinsi Jawa Barat dalam periode 2015-2019. Tidak adanya signifikansi dana bagi hasil terhadap belanja daerah disebabkan oleh belum terciptanya keoptimalan dana baik pajak maupun non pajak untuk mendanai kebutuhan daerah yang telah dianggarkan di RAPBD. Dana bagi hasil merupakan bagian dari perimbangan yang bersumber dari dana pajak dan bukan pajak kemudian diberikan kepada daerah masing-masing yang akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan public dll. Permasalahan ketergantungan tersebut perlu diemilnir dengan menjalankan langkah yang strategis untuk menggali potensi yang dimiliki yaitu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fauzyny, 2013), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian (Untung et al., 2017); (Nugroho & Hardi, 2014); (Wulandari, 2014) Menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (BD).

Jumlah Penduduk dan Belanja Daerah



Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah Kab/kota di provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2015-2019. Meningkatnya akan jumlah penduduk juga akan berpengaruh dengan akan meningkatnya Belanja Daerah. Dan apabila menurunnya Jumlah Penduduk juga akan berpengaruh dengan menurunnya Belanja Daerah. Meningkatnya jumlah penduduk di suatu daerah akan meningkatkan perkembangan pada daerah tersebut. Tetapi jika penduduk terus berkembang dan pemerintah tidak dapat mengendalikan maka akan menurunkan kualitas perkembangan suatu daerah. Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sasana, 2011) dan (Samudra & Handayani, 2020) menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan penelitian dari Devita et al (2014) menghasilkan kesimpulan, belanja daerah tidak dipengaruhi oleh jumlah penduduk.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana bagi hasil (DBH) secara parsial berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap belanja daerah. Kedua, secara parsial Jumlah penduduk (JP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Ketiga, secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Jumlah Penduduk (JP) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Terdapat keterbatasan dalam riset ini yaitu dengan jumlah sampel yang digunakan hanyalah 8 kab/kota, sedangkan di provinsi Jawa Barat terdapat 25 kab/kota. Kemudian untuk variable yang digunakan dalam penelitian ini hanya 3 variabel dan masih banyak variable lain yang dapat mempengaruhi tingkat belanja daerah. Saran untuk peneliti lain, diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dengan variable yang lebih bervariasi.

Daftar Pustaka

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 190-205.
- Bawono, A., & Shina, A. F. I. (2018). *Ekonometrika Terapan Untuk Ekonomi dan Bisnis Islam Aplikasi dengan Eviews*.
- Chalil, & Munawar, T. (2018). *Political Cycles, Government Spending, and Efficiency of Indonesia' Local Governments*. 88082.
- Dermawan, W. D. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat). *Ilmiah EDIKASI*, 5(2), 153-156.



- Devita, A., Arman, D., & Junaidi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 2, 63–70.
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013) Undang-Undang Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalima. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(1).
- Fauzyny, W. (2013). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2011. *SKRIPSI*.
- Gorahe, I. A. M., Masinambow, V., & Engka, D. (2014). *Analisis belanja daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di provinsi sulawesi utara*. 1–12.
- Hasanah, N. N. (2008). Pengujian Heteroskedastisitas Pada Regresi Non Linear Dengan Menggunakan Uji glejser. *Skripsi*.
- Inawati, Y., Muhammad, S. A., Pandu, N. W., Nailis, S., & Yusvita, N. A. (2021). Analisis Determinan Minat Mahasiswa Dalam Berinvestasi di Pasar Modal Syariah. *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 1–13.
- Karim, A., Fathurrohman, A., Suhartono, & Prastyo, D. D. (2018). *Pengujian lagrange multiplier pada spesifikasi spatial model pertumbuhan ekonomi indonesia*. 2017, 5–8.
- Nugroho, A. E., & Hardi, M. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Barat Tahun 2014. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 9–18.
- Putra, I. B. D., & Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13, 811–827.
- Rahmawati, L. A., & Suryono, B. (2015). Flypaper effect Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan asli Daerah Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(9).
- Rudiansyah, R. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *ACADEMIA Jurnal Ekonomi*, 4(1).
- Samudra, G., & Handayani, N. (2020). Pengaruh Kemandirian, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4).



STIE Mahaputra Riau

AMBITEK

Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi

Vol. 2. No. 1 (2022) Hal. 25-40

- Santosa, A. B., & Rofiq, M. A. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Periode Tahun 2007 – 2010). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 20(2), 184–198.
- Sanusi, A., & Yusuf, M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara Tahun 2013-2015 Pendekatan Panel Regression. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 50–56.
- Sasana, H. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era otonomi dan desentralisasi fiskal. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 18(1), 46–58.
- Suryani, A. I. (2018). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur , Jawa Tengah dan Jawa Barat Periode 2011-2013). *Journal Of Accounting Science*, 2(2), 165–179.
- Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1).
- Untung, J., Widyastuti, T., & Suyanto. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Terhadap Belanja Daerah Dan Dana Bagi Hasil Sebagai Pemoderasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomi*, 1(2).
- Wulandari, Y. (2014). Pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di indonesia. *Artikel*.
- Zais, G. M. (2017). *Faktor-faktor yang Memengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan*. 140–147.